

KESENJANGAN PENDIDIKAN SEKOLAH UMUM DAN MADRASAH: FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAKNYA BAGI PESERTA DIDIK DI KABUPATEN SIMEULUE

Septimi Hartati Natalia¹, Silahuddin², Warul Walidin³, Mujiburahman⁴

UIN Ar-raniry Banda Aceh^{1,2,3,4}

Email : mimilubis77@gmail.com

ABSTRAK

Dualisme sistem pendidikan nasional antara sekolah umum dan madrasah memicu ketimpangan pengelolaan dan dukungan sumber daya, khususnya di Kabupaten Simeulue. Sekolah umum yang bernaung di bawah Kemendikbudristek mendapatkan prioritas anggaran daerah, sementara madrasah di bawah Kementerian Agama sering terabaikan karena regulasi instansi vertikal. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab serta dampak kesenjangan tersebut melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap kepala sekolah dan madrasah. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa disparitas utamanya disebabkan oleh perbedaan regulasi kelembagaan dan mekanisme birokrasi; sekolah umum diuntungkan oleh sistem desentralisasi yang mempermudah akses pembangunan sarana dan pelatihan guru, sedangkan madrasah terhambat oleh birokrasi sentralistik dan keterbatasan kuota bantuan. Kondisi ini diperparah oleh minimnya kesempatan pengembangan kompetensi guru madrasah dan ketergantungan penuh pada dana BOS. Dampak signifikan dari kesenjangan ini adalah degradasi citra madrasah di mata masyarakat yang berujung pada penurunan drastis jumlah peserta didik, bahkan beberapa madrasah terancam ditutup karena kekurangan siswa. Dapat disimpulkan bahwa kesenjangan ini bersifat struktural dan administratif, sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan serta strategi kolaboratif antara madrasah, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelamatkan eksistensi pendidikan keagamaan di wilayah tersebut.

Kata kunci : *Dualisme Pendidikan, Kesenjangan Pendidikan, Madrasah*

ABSTRACT

The dualism of the national education system between public schools and madrasahs has led to disparities in management and resource support, particularly in Simeulue Regency. Public schools under the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology receive priority in the regional budget, while madrasahs under the Ministry of Religious Affairs are often neglected due to vertical agency regulations. This study aims to analyze the causes and impacts of this disparity through a qualitative approach using observational data collection techniques, in-depth interviews, and documentation of school and madrasah principals. The research findings reveal that the disparity is primarily caused by differences in institutional regulations and bureaucratic mechanisms. Public schools benefit from a decentralized system that facilitates access to facility development and teacher training, while madrasahs are hampered by centralized bureaucracy and limited funding quotas. This situation is exacerbated by limited opportunities for madrasah teacher competency development and a complete dependence on BOS funds. A significant impact of this disparity is the degradation of the image of madrasahs in the public eye, leading to a drastic decline in student enrollment. Some madrasahs are even threatened with closure due to a lack of students. It can be concluded that this gap is structural and administrative in nature, necessitating policy harmonization and collaborative strategies between madrasahs, the community, and the government to safeguard the existence of religious education in the region.

Keywords: *Educational Dualism, Educational Gap, Madrasas*

PENDAHULUAN

Dalam tatanan sistem pendidikan nasional di Indonesia, terdapat dua jalur utama yang berjalan beriringan, yakni lembaga pendidikan formal dan non-formal. Pada jalur formal, struktur pendidikan terbagi menjadi sekolah umum yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta madrasah yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Secara filosofis dan konstitusional, kedua jenis lembaga ini memiliki tujuan mulia yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter generasi muda yang berkualitas (Ghofur et al., 2024; Miftahusalimah et al., 2025). Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup tajam antara idealisme undang-undang dengan praktik eksekusi kebijakan, terutama terkait dukungan dari pemerintah daerah. Sekolah umum cenderung memperoleh *privilege* dan dukungan penuh dari pemerintah daerah karena posisi mereka yang terdesentralisasi, sehingga lebih mudah mendapatkan akses berbagai bentuk bantuan operasional maupun fisik. Hal ini dikarenakan sekolah umum menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di setiap tahunnya, yang menjadikan fasilitas dan operasional mereka jauh lebih terjamin dibandingkan lembaga pendidikan keagamaan.

Sebaliknya, nasib berbeda dialami oleh madrasah yang sering kali menghadapi kendala struktural dalam mengakses bantuan pemerintah daerah. Madrasah kerap dianggap sebagai instansi vertikal yang garis komandonya langsung ke pemerintah pusat di Jakarta, sehingga pembiayaannya dianggap sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Agama. Paradigma birokrasi ini menyebabkan pemerintah daerah merasa tidak memiliki kewajiban langsung untuk mengalokasikan dana bagi pengembangan madrasah. Akibatnya, madrasah sering kali kekurangan dukungan finansial dari pemerintah daerah setempat karena terbentur aturan administratif mengenai kewenangan pengelolaan. Dana yang turun dari pusat sering kali tidak mencukupi kebutuhan operasional yang terus meningkat, sementara pintu bantuan dari daerah tertutup rapat. Dualisme pengelolaan ini menciptakan ketimpangan yang nyata, di mana satu institusi pendidikan melaju kencang dengan dukungan ganda (pusat dan daerah), sementara institusi lainnya harus berjuang keras hanya dengan mengandalkan satu sumber pendanaan yang terbatas dan sering kali terlambat cair (Adam, 2021; Hamida et al., 2025; Kultsum et al., 2022).

Fenomena ketimpangan ini bukanlah isu baru, namun telah menjadi rahasia umum yang kronis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Di wilayah ini, secara terang-terangan disampaikan oleh pemangku kebijakan bahwa madrasah tidak dapat menerima bantuan hibah atau bantuan sosial dari pemerintah daerah karena dianggap bertentangan dengan regulasi dan petunjuk teknis (*juknis*) yang berlaku. Kondisi birokratis ini memaksa pengelola madrasah untuk bertahan hidup dengan kemampuan anggaran internal yang sangat terbatas, yang sering kali hanya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya pas-pasan. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada fisik bangunan, tetapi juga terlihat sangat mencolok dalam hal pengembangan sumber daya manusia, khususnya pelatihan dan peningkatan mutu guru. Dalam aspek ini, madrasah jauh tertinggal dibandingkan sekolah umum karena akses terhadap program pengembangan profesional sangat minim dan terbatas bagi guru-guru di lingkungan Kementerian Agama.

Kesenjangan kompetensi guru menjadi dampak turunan yang serius dari kebijakan diskriminatif tersebut. Sekolah umum di Kabupaten Simeulue secara rutin melaksanakan pelatihan berskala besar yang didanai oleh daerah, sehingga kompetensi guru mereka dapat ditingkatkan secara menyeluruh dan merata. Sebaliknya, pelatihan yang diberikan kepada guru

madrasah sangat terbatas frekuensinya. Sering kali, dalam satu kesempatan pelatihan, madrasah hanya diperbolehkan mengikutsertakan satu orang perwakilan per bidang studi karena keterbatasan kuota anggaran. Akibatnya, distribusi pengetahuan dan kompetensi guru di madrasah menjadi tidak merata. Ilmu yang didapat dari pelatihan sering kali berhenti pada satu individu dan tidak terimbaskan dengan baik kepada rekan sejawat lainnya. Situasi ini menciptakan *gap* kualitas pengajaran yang semakin lebar antara sekolah umum dan madrasah, yang pada akhirnya merugikan peserta didik yang menimba ilmu di lembaga pendidikan berbasis agama tersebut.

Selain masalah pendanaan dan mutu sumber daya manusia, tantangan lain yang tak kalah pelik adalah status kelembagaan. Sebagian besar madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama merupakan madrasah swasta yang dikelola oleh masyarakat atau yayasan. Data menunjukkan bahwa dari 33 madrasah yang beroperasi di Kabupaten Simeulue, hanya 8 lembaga yang berstatus negeri, sedangkan sisanya adalah madrasah swasta yang harus mandiri secara finansial. Upaya untuk mengubah status menjadi negeri atau proses penegerian madrasah swasta sangat sulit dilakukan karena terbentur kebijakan kuota nasional. Setiap provinsi biasanya hanya mendapat jatah satu hingga dua kuota penegerian per tahun, bahkan dalam beberapa periode anggaran, pemerintah pusat tidak membuka kesempatan tersebut sama sekali. Hal ini menyebabkan banyak madrasah swasta terjebak dalam status quo tanpa harapan yang jelas untuk mendapatkan status negeri yang menjamin kesejahteraan dan operasional yang lebih stabil.

Salah satu penyebab sulitnya penegerian dan minimnya bantuan adalah adanya anggapan keliru bahwa madrasah swasta berada di bawah yayasan yang mapan. Sering kali diasumsikan bahwa yayasan memiliki dukungan dana besar sebagaimana yang terjadi pada yayasan pendidikan bonafide di kota-kota besar di Pulau Jawa. Namun, kenyataannya di lapangan sangat berbeda; yayasan pendidikan di Kabupaten Simeulue umumnya hanya berfungsi sebagai payung hukum agar madrasah memperoleh izin operasional, bukan sebagai penyedia dana utama yang kaya raya. Lebih memprihatinkan lagi, satu yayasan sering kali harus menaungi hingga 17 madrasah swasta sekaligus dengan kondisi keuangan yang sangat terbatas. Penelitian sebelumnya oleh menegaskan adanya perbedaan signifikan antara sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) (Mukhlisin et al, 2021; Astawa, 2021; Elwardiansyah et al., 2025; Nur et al., 2016). Perbedaan fundamental tersebut meliputi fleksibilitas pengelolaan pendanaan, volume pemberian bantuan, hingga tingkat perhatian politis yang diberikan pemerintah.

Dampak dari pengabaian sistemik ini juga merembet pada kesejahteraan tenaga pendidik. Kesejahteraan guru pada madrasah masih sangat memprihatinkan dan jauh di bawah standar kelayakan, padahal baik sekolah umum maupun madrasah sama-sama memiliki kontribusi penting dan beban yang setara dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, baik dalam pengetahuan umum maupun pendidikan agama. Penelitian Arini et al., (2025) juga menyatakan bahwa madrasah sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Pendidikan madrasah dianggap kurang mampu bersaing dengan satuan pendidikan sederajat lainnya, dan tata kelola lembaganya sering dikritik kurang profesional. Melihat berbagai kesenjangan antara sekolah umum dan madrasah di atas, maka penulis merasa perlu melakukan kajian lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab ketimpangan tersebut secara spesifik di daerah ini dan mencarikan solusinya. Penulis menilai bahwa isu ini memiliki nilai kebaruan karena belum banyak diteliti oleh peneliti lain, khususnya dalam konteks kebijakan lokal di Kabupaten Simeulue.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) untuk menganalisis secara mendalam fenomena kesenjangan antara sekolah umum dan madrasah di Kabupaten Simeulue. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk menggali makna, memahami dinamika sosial, dan menangkap perspektif subjek penelitian dalam konteks alaminya, sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2018) bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami masalah manusia berdasarkan pola dan deskripsi naratif. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi faktor-faktor struktural, kebijakan, dan kultural yang menyebabkan disparitas pengelolaan pendidikan. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*, terdiri dari tiga informan kunci yang merepresentasikan spektrum pengelolaan pendidikan di wilayah tersebut: satu orang kepala sekolah umum (SMP/SMA), satu orang kepala madrasah negeri (MTsN/MAN), dan satu orang kepala madrasah swasta. Pemilihan subjek ini dimaksudkan untuk mendapatkan data komparatif yang kaya mengenai pengalaman, tantangan, dan strategi manajerial dari berbagai jenis institusi.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi yang meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan studi dokumentasi. Observasi dilaksanakan untuk melihat langsung kondisi fisik bangunan, sarana prasarana, dan aktivitas pembelajaran di sekolah maupun madrasah. Wawancara mendalam dilakukan dengan kepala sekolah dan kepala madrasah untuk menggali informasi mengenai hambatan birokrasi, alokasi anggaran, pengembangan guru, serta dampak kebijakan terhadap operasional sekolah. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis data sekunder seperti laporan anggaran (BOS), data jumlah siswa, dan regulasi terkait. Analisis data dilakukan secara induktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui metode ini, peneliti berupaya menyusun narasi deskriptif yang komprehensif mengenai realitas ketimpangan pendidikan, sehingga dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Simeulue.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Kondisi Kesenjangan Struktural antara Sekolah Umum dan Madrasah

Kabupaten Simeulue yang merupakan wilayah kepulauan menunjukkan adanya disparitas yang sangat mencolok dalam lanskap pendidikan, khususnya antara sekolah umum dan madrasah. Berdasarkan data lapangan tahun 2024, dari total satuan pendidikan yang ada, terdapat dominasi jumlah sekolah umum sebanyak 148 unit dibandingkan dengan madrasah yang hanya berjumlah 33 unit. Ketimpangan ini semakin diperparah oleh status kelembagaan, di mana hampir seluruh sekolah umum berstatus negeri, sedangkan madrasah didominasi oleh status swasta (25 unit swasta berbanding 8 negeri). Kondisi ini menciptakan perbedaan mendasar dalam akses terhadap sumber daya pemerintah. Sekolah umum yang bernaung di bawah Kemendikbudristek mendapatkan keuntungan dari otonomi daerah, sehingga proses penegerian dan alokasi anggaran pembangunan melalui APBD lebih mudah diakses. Sebaliknya, madrasah di bawah Kementerian Agama harus menghadapi jalur birokrasi terpusat yang panjang dengan kuota penegerian yang sangat terbatas, menyebabkan banyak madrasah swasta sulit berkembang meskipun kebutuhan pendidikan agama di masyarakat cukup tinggi.

Dalam aspek sarana dan prasarana, kesenjangan terlihat sangat nyata dan berdampak langsung pada kenyamanan proses belajar mengajar. Sekolah umum menikmati kemudahan pengusulan perbaikan fasilitas melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) daerah, di mana pemerintah kabupaten memiliki wewenang penuh untuk melakukan intervensi fisik. Hal ini berbeda drastis dengan madrasah, khususnya yang berstatus

swasta dan berdiri di atas tanah wakaf. Pengajuan bantuan sarana prasarana madrasah harus melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau aplikasi pusat dengan persyaratan administrasi yang ketat, termasuk status kepemilikan tanah yang harus milik kementerian. Akibatnya, banyak proposal pembangunan madrasah yang diajukan bertahun-tahun tidak terealisasi karena terbentur masalah aset dan keterbatasan kuota nasional. Fenomena ini menyebabkan kondisi fisik bangunan madrasah di Simeulue jauh tertinggal dibandingkan sekolah umum yang terus mengalami pembaruan fasilitas secara berkala.

2. Analisis Faktor Penyebab Kesenjangan Kebijakan dan Sumber Daya

Akar permasalahan kesenjangan pendidikan di Kabupaten Simeulue tidak terlepas dari faktor dualisme kelembagaan dan regulasi yang memisahkan pengelolaan sekolah umum dan madrasah. Perbedaan naungan kementerian menciptakan standar pelayanan dan mekanisme birokrasi yang tidak setara. Sekolah umum diuntungkan oleh sistem desentralisasi pendidikan, di mana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan politis untuk memajukan sekolah di wilayahnya. Hal ini mempermudah alur koordinasi, verifikasi kebutuhan, hingga eksekusi anggaran. Di sisi lain, madrasah terikat pada sistem sentralistik Kementerian Agama, di mana kebijakan strategis seperti pengadaan sarana dan rekrutmen pegawai ditentukan oleh pusat. Keterbatasan wewenang kantor kementerian agama di tingkat kabupaten membuat respons terhadap kerusakan infrastruktur atau kekurangan guru di madrasah menjadi lambat, karena segala keputusan sangat bergantung pada ketersediaan kuota dan anggaran dari Jakarta yang harus dibagi ke seluruh Indonesia.

Selain faktor regulasi, ketimpangan kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik, menjadi faktor penyebab yang krusial. Guru di sekolah umum memiliki akses yang luas terhadap pengembangan kompetensi melalui berbagai program pelatihan dan lokakarya yang didanai oleh pemerintah daerah maupun pusat secara rutin. Distribusi guru berstatus ASN juga lebih merata di sekolah umum, sehingga beban operasional sekolah untuk menggaji guru berkurang. Sebaliknya, madrasah menghadapi krisis pengembangan profesi karena kuota pelatihan dari Kementerian Agama sangat minim, terkadang hanya satu slot per kabupaten untuk bidang studi tertentu. Mayoritas guru madrasah, terutama di sektor swasta, adalah tenaga honorer yang digaji seadanya melalui dana BOS. Hal ini berdampak pada fluktuasi motivasi dan kualitas pengajaran, karena madrasah kesulitan mempertahankan guru berkualitas yang seringkali beralih profesi atau pindah ke sekolah negeri demi kesejahteraan yang lebih baik.

3. Ketergantungan Finansial dan Problematika Dana Operasional

Mekanisme pendanaan pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berbasis pada jumlah siswa menjadi pedang bermata dua bagi keberlangsungan madrasah di Simeulue. Besaran dana yang diterima satuan pendidikan dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar, dengan nominal yang bertingkat sesuai jenjang pendidikan. Bagi sekolah umum yang memiliki populasi siswa besar, dana BOS menjadi sumber daya yang cukup untuk membiayai operasional, perawatan ringan, dan kegiatan kesiswaan. Namun, bagi madrasah swasta yang rata-rata memiliki jumlah siswa sangat sedikit, dana BOS yang diterima menjadi sangat minim. Masalah menjadi pelik ketika dana yang terbatas tersebut harus diprioritaskan untuk membayar gaji guru non-ASN, mengingat madrasah swasta tidak mendapatkan suplai guru PNS dari pemerintah. Akibatnya, hampir tidak ada sisa anggaran yang dapat dialokasikan untuk perbaikan fasilitas atau pengembangan mutu pembelajaran.

Ketergantungan mutlak pada dana BOS tanpa adanya sumber pendanaan alternatif membuat madrasah swasta terjebak dalam siklus kemunduran kualitas yang sulit diputus. Ketika jumlah siswa menurun, dana operasional pun menyusut, yang kemudian memaksa madrasah melakukan efisiensi ketat, termasuk pengurangan kesejahteraan guru dan peniadaan

perawatan sarana. Kondisi fasilitas yang semakin memburuk dan kualitas pengajaran yang stagnan ini selanjutnya membuat daya tarik madrasah semakin pudar di mata masyarakat, yang berujung pada penurunan jumlah siswa baru di tahun berikutnya. Berbeda dengan sekolah negeri yang gaji gurunya ditanggung negara dan pembangunan fisiknya didukung pemerintah daerah, madrasah swasta di Simeulue harus berjuang sendiri menutupi biaya operasional. Ketidakmampuan finansial ini menjadi penghambat utama bagi madrasah untuk bersaing secara kompetitif dengan sekolah umum dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

4. Dinamika Persepsi Masyarakat dan Krisis Pendaftaran Siswa

Kesenjangan fasilitas dan kualitas yang kasat mata telah membentuk persepsi kuat di kalangan masyarakat Simeulue bahwa sekolah umum menawarkan masa depan pendidikan yang lebih menjanjikan dibandingkan madrasah. Orang tua cenderung memilih menyekolahkan anaknya di sekolah umum karena melihat kondisi fisik bangunan yang megah, lingkungan belajar yang tertata, serta ketersediaan guru yang kompeten dan bersertifikasi. Madrasah, dengan kondisi ruang kelas yang seringkali rusak, fasilitas penunjang yang minim, dan ketidakpastian tenaga pengajar, dipersepsikan sebagai lembaga pendidikan kelas dua. Citra ini sangat mempengaruhi keputusan orang tua saat penerimaan peserta didik baru. Meskipun madrasah menawarkan keunggulan dalam kurikulum keagamaan, hal tersebut belum cukup kuat untuk mengalahkan daya tarik fasilitas dan jaminan kualitas yang ditawarkan oleh sekolah umum di bawah naungan dinas pendidikan.

Dampak dari persepsi negatif tersebut terlihat jelas pada data pendaftaran siswa yang menunjukkan tren penurunan drastis di lingkungan madrasah setiap tahunnya. Temuan di lapangan sangat mengkhawatirkan, di mana terdapat madrasah tingkat Aliyah yang total siswanya dari kelas sepuluh hingga dua belas hanya berjumlah sepuluh orang. Demikian pula di tingkat Tsanawiyah dan Ibtidaiyah, jumlah siswa gabungan seluruh kelas sangat jauh di bawah standar rombongan belajar yang ideal. Krisis jumlah siswa ini bukan sekadar masalah statistik, melainkan ancaman eksistensial bagi keberlangsungan lembaga. Berdasarkan analisis data, terdapat potensi penutupan beberapa madrasah pada tahun mendatang jika tidak ada lonjakan pendaftar. Situasi ini menegaskan bahwa kesenjangan yang dibiarkan berlarut-larut telah menggerus kepercayaan publik dan mengancam eksistensi pendidikan berbasis agama di wilayah kepulauan tersebut.

5. Strategi Penguatan Internal dan Kolaborasi Eksternal

Menghadapi tantangan kesenjangan yang kompleks, madrasah di Kabupaten Simeulue perlu menerapkan strategi penguatan internal melalui inovasi program dan optimalisasi promosi. Salah satu langkah kunci adalah meningkatkan mutu madrasah dengan mengembangkan program unggulan yang tidak dimiliki sekolah umum, seperti tahfidz Al-Qur'an intensif atau pembinaan karakter islami yang kuat. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler harus diaktifkan kembali untuk menarik minat siswa. Promosi lembaga tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional, melainkan harus merambah ke media sosial untuk membangun citra positif dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dengan menonjolkan keunikan dan prestasi spesifik, madrasah dapat perlahan mengubah stigma negatif terkait fasilitas fisik dan menawarkan nilai tambah berupa pembentukan akhlak yang menjadi kekhawatiran utama orang tua di era modern saat ini.

Di sisi lain, penguatan kelembagaan tidak dapat dilakukan secara mandiri, melainkan membutuhkan strategi kolaborasi eksternal yang solid dengan berbagai elemen masyarakat. Peran Komite Madrasah harus direvitalisasi dari sekadar formalitas menjadi mitra strategis dalam penggalangan dana dan penyambung aspirasi antara sekolah dan wali murid. Melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan alumni yang berpengaruh sangat penting untuk memobilisasi dukungan moral maupun materiel. Kolaborasi ini bertujuan untuk menumbuhkan

rasa kepemilikan masyarakat terhadap madrasah, sehingga tanggung jawab pendidikan tidak hanya bertumpu pada dana pemerintah yang terbatas. Dengan membangun jaringan komunikasi yang efektif dengan pihak eksternal, madrasah dapat membuka peluang bantuan swadaya masyarakat atau wakaf produktif yang dapat digunakan untuk menutupi kekurangan biaya operasional dan perbaikan sarana mendesak.

Pembahasan

Analisis mendalam terhadap data lapangan mengungkapkan bahwa disparitas pendidikan di Kabupaten Simeulue bukan sekadar masalah teknis operasional, melainkan dampak sistemik dari dualisme kelembagaan yang tajam antara sekolah umum dan madrasah. Kesenjangan struktural ini bermula dari perbedaan payung regulasi, di mana sekolah umum diuntungkan oleh desentralisasi pendidikan yang memungkinkan intervensi langsung pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebaliknya, madrasah yang bernaung di bawah Kementerian Agama terjebak dalam mekanisme sentralistik yang kaku, menyebabkan lambatnya respons terhadap kebutuhan mendesak di daerah. Temuan ini mengonfirmasi bahwa status kelembagaan negeri versus swasta menjadi determinan utama dalam akses sumber daya. Dominasi jumlah sekolah umum yang berstatus negeri menciptakan hegemoni fasilitas, sementara madrasah yang mayoritas swasta harus berjuang sendirian tanpa dukungan kebijakan yang memadai. Implikasinya, terjadi ketimpangan layanan pendidikan yang mencolok, di mana siswa di madrasah tidak mendapatkan hak fasilitas yang setara dengan rekan mereka di sekolah umum.

Kondisi infrastruktur fisik menjadi indikator paling nyata dari ketimpangan kebijakan penganggaran tersebut. Mekanisme pengusulan bantuan sarana melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang mudah diakses oleh sekolah umum terbukti efektif dalam menjaga kualitas bangunan sekolah. Di sisi lain, madrasah menghadapi tembok birokrasi tebal melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang mensyaratkan status tanah milik kementerian, sebuah syarat yang sulit dipenuhi oleh madrasah swasta yang berdiri di atas tanah wakaf. Akibatnya, banyak madrasah mengalami degradasi fasilitas yang parah tanpa solusi perbaikan yang jelas. Analisis ini menunjukkan bahwa regulasi aset yang kaku di tingkat pusat menjadi penghambat utama pembangunan madrasah di daerah kepulauan (Ashari et al., 2023; Azizurahman et al., 2025; Kultsum et al., 2022). Jika regulasi ini tidak dilonggarkan atau disesuaikan dengan konteks lokal, maka jurang perbedaan fasilitas fisik antara kedua jenis institusi ini akan semakin melebar dan sulit dijembatani.

Selain aspek fisik, ketimpangan kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik, menjadi isu krusial yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Analisis data menunjukkan bahwa guru di sekolah umum memiliki privilese akses terhadap pengembangan kompetensi yang didanai pemerintah, menjamin pembaruan pedagogis yang berkelanjutan. Sebaliknya, guru madrasah mengalami stagnasi profesionalisme akibat minimnya kuota pelatihan dari kementerian terkait. Situasi ini diperburuk oleh masalah kesejahteraan, di mana mayoritas guru madrasah adalah tenaga honorer dengan gaji yang sangat minim dan fluktuatif. Ketidakpastian finansial ini berdampak langsung pada motivasi mengajar dan tingginya angka perputaran (*turnover*) guru yang mencari penghidupan lebih baik (Hutasuhut et al., 2025; Kartini & Kristiawan, 2019; Rizaldi et al., 2025). Implikasi dari kondisi ini adalah ketidakstabilan proses belajar mengajar di madrasah, yang pada akhirnya merugikan pencapaian akademik siswa dan menurunkan daya saing lulusan madrasah dibandingkan sekolah umum.

Masalah finansial madrasah swasta di Simeulue semakin pelik akibat ketergantungan mutlak pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berbasis jumlah siswa. Sistem pendanaan ini menciptakan siklus setan bagi institusi kecil; jumlah siswa yang sedikit

menghasilkan dana operasional yang minim, yang kemudian habis hanya untuk membayar honorarium guru, tanpa menyisakan anggaran untuk pemeliharaan fasilitas atau peningkatan mutu. Ketidadaan diversifikasi sumber pendanaan membuat madrasah sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Ketika pendaftaran siswa menurun, kualitas layanan ikut merosot, yang kemudian menyebabkan penurunan siswa lebih lanjut di tahun berikutnya. Temuan ini menggarisbawahi kelemahan fundamental dalam model pembiayaan satuan pendidikan swasta yang tidak memiliki *safety net* atau dana cadangan, menempatkan mereka dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan untuk berkompetisi dengan sekolah negeri yang disubsidi penuh oleh negara (Mirela et al., 2022; Suryono, 2015; Zainudin, 2021).

Dampak akumulatif dari ketertinggalan fasilitas dan ketidakpastian kualitas guru ini telah membentuk persepsi publik yang negatif, menempatkan madrasah sebagai pilihan pendidikan "kelas dua". Stigma ini tercermin kuat dari data pendaftaran siswa baru yang menunjukkan tren penurunan drastis hingga mencapai titik kritis yang mengancam eksistensi lembaga. Masyarakat Simeulue cenderung rasional dalam memilih pendidikan, memprioritaskan bukti fisik kemegahan sekolah dan jaminan karier guru ASN yang ada di sekolah umum daripada kurikulum agama di madrasah yang fasilitasnya memprihatinkan. Fenomena krisis siswa di tingkat Aliyah yang hanya mencapai angka satuan per angkatan merupakan sinyal bahaya nyata. Jika persepsi masyarakat ini tidak segera diubah melalui perbaikan kualitas yang nyata, implikasi jangka panjangnya adalah penutupan massal madrasah swasta, yang berarti hilangnya basis pendidikan karakter religius di wilayah tersebut (Ahmad, 2023; Asafila & Lessy, 2024; Zarkasyi, 2021).

Merespons tekanan eksternal tersebut, strategi bertahan madrasah tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara konvensional, melainkan harus melakukan transformasi internal melalui diferensiasi produk pendidikan. Analisis pembahasan menyarankan bahwa madrasah harus membangun *branding* yang kuat pada program-program keagamaan spesifik yang tidak dimiliki sekolah umum, seperti program intensif *tahfidz* Al-Qur'an atau pembinaan akhlak mulia. Dengan menawarkan nilai tambah (*value added*) yang unik, madrasah dapat mengalihkan fokus orang tua dari kekurangan fasilitas fisik menuju keunggulan pembentukan karakter anak. Selain itu, pemanfaatan media digital untuk promosi menjadi keharusan di era informasi ini untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas dan mengubah *image* madrasah yang tertinggal menjadi lembaga pendidikan modern yang tetap memegang teguh nilai-nilai Islam, sehingga dapat kembali menarik minat calon peserta didik (Jabbar et al., 2025; Riyadi et al., 2023; Wahyudi & Soleh, 2023).

Terakhir, keberlanjutan madrasah di tengah keterbatasan dukungan pemerintah sangat bergantung pada kemampuan membangun kolaborasi eksternal dengan *stakeholder* masyarakat. Peran komite sekolah dan alumni harus direvitalisasi dari sekadar pelengkap administrasi menjadi motor penggerak dukungan filantropi. Strategi menggalang dana melalui wakaf produktif atau donasi komunitas menjadi solusi alternatif untuk memutus ketergantungan pada dana BOS yang terbatas. Keterlibatan aktif tokoh masyarakat dan pemuka agama juga krusial untuk memulihkan kepercayaan publik. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya memotret kondisi pada satu periode waktu dan lokasi spesifik, sehingga dinamika kebijakan yang berubah cepat mungkin memerlukan kajian lanjutan. Secara keseluruhan, masa depan madrasah di Simeulue bergantung pada sinergi antara inovasi internal pengelola dan partisipasi aktif masyarakat dalam menanggung beban pendidikan secara gotong royong.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa disparitas pendidikan di Kabupaten Simeulue bukan sekadar masalah teknis operasional, melainkan dampak sistemik dari dualisme kelembagaan yang tajam antara sekolah umum di bawah pemerintah daerah dan madrasah di bawah Kementerian Agama. Sekolah umum menikmati privilese desentralisasi melalui dukungan APBD dan kemudahan mekanisme Musrenbang, sementara madrasah terhambat oleh regulasi sentralistik yang kaku, seperti persyaratan aset tanah negara untuk mengakses bantuan fisik. Ketimpangan struktural ini diperparah oleh model pendanaan tunggal berbasis dana BOS, yang gagal menyediakan *safety net* bagi madrasah kecil, mengakibatkan degradasi fasilitas dan stagnasi kesejahteraan guru *honorer* yang memicu tingginya *turnover*. Akumulasi ketertinggalan fisik dan ketidakstabilan sumber daya manusia ini telah membentuk persepsi publik negatif, menempatkan madrasah sebagai pilihan "kelas dua" dan memicu krisis pendaftaran siswa yang mengancam keberlangsungan institusi. Implikasinya, tanpa adanya reformasi regulasi yang lebih fleksibel dan afirmatif terhadap kondisi lokal kepulauan, jurang kualitas pendidikan akan terus melebar dan merugikan hak siswa madrasah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang setara.

Dalam menghadapi tekanan eksternal tersebut, strategi keberlanjutan madrasah harus bergeser dari ketergantungan pemerintah menuju kemandirian melalui diferensiasi produk dan kolaborasi sosial. Pengelola madrasah dituntut menciptakan *branding* institusi yang kuat dengan menawarkan *value added* berupa program karakter dan *tahfidz* yang tidak dimiliki sekolah umum, serta memanfaatkan media *digital* untuk memulihkan citra lembaga. Selain itu, revitalisasi peran *stakeholder* seperti alumni dan tokoh masyarakat sangat krusial untuk menggalang pendanaan alternatif berbasis wakaf produktif guna menutupi defisit operasional. Untuk penelitian ke depan, disarankan melakukan analisis kebijakan komparatif mengenai efektivitas desentralisasi pendidikan agama di daerah lain sebagai bahan rujukan reformasi regulasi. Penelitian lanjutan juga perlu melakukan studi *longitudinal* untuk mengukur dampak jangka panjang dari ketimpangan fasilitas sekolah terhadap pencapaian kognitif dan kesuksesan karier lulusan madrasah di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Selain itu, kajian mendalam mengenai model *fundraising* digital yang paling efektif untuk lembaga pendidikan swasta di daerah terpencil juga sangat relevan untuk dilakukan guna memberikan solusi praktis bagi kemandirian finansial madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2021). Kebijakan otonomi perguruan tinggi sebagai dampak reformasi keuangan dalam bidang pendidikan di Indonesia. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 2(1), 52. <https://doi.org/10.51454/jet.v2i1.106>
- Ahmad, S. (2023). Implementasi supervisi manajerial pengawas dalam meningkatkan kinerja guru PAI di MIN 4 Aceh Tenggara era Covid-19. *MUDABBIR: Journal Research and Education Studies*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v1i1.3>
- Arini, A., et al. (2025). Evaluasi manajemen pendidikan di madrasah negeri di Kalimantan Timur: Peran sistem informasi dalam penjaminan mutu pendidikan. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 446. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5726>
- Asafila, I. M., & Lessy, Z. (2024). Pengembangan budaya unggul untuk pembentukan mutu akademik peserta didik di MTsN 2 Kota Kediri. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), 393. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i2.2993>

- Ashari, M. K., et al. (2023). Considering local government policies related to Madrasah Diniyah Takmiliyah in Indonesia. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 4(3), 414. <https://doi.org/10.31538/tijie.v4i3.411>
- Astawa, I. N. T. (2021). Pendidikan agama dan keagamaan dalam menunjang mutu pendidikan di Indonesia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 7(2). <https://doi.org/10.25078/jpm.v7i2.2776>
- Azizurahman, A., et al. (2025). Peran tenaga kependidikan sebagai agen inovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 131. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i1.4314>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Elwardiansyah, M. H., et al. (2025). Kebutuhan untuk pembaharuan pendidikan di sekolah Islam: Tantangan, perubahan sosial, dan landasan kebutuhan. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(3), 1300. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i3.6638>
- Ghofur, A., et al. (2024). Analisis pendidikan karakter melalui kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (MI). *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(4), 1128. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i4.3761>
- Hamida, I., et al. (2025). Pengembangan administrasi keuangan berbasis Foxpro untuk meningkatkan efektifitas program kerja di MTs. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 31. <https://doi.org/10.51878/social.v5i1.4574>
- Hutasuhut, S., et al. (2025). Kesejahteraan guru di Indonesia. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 227. <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.277>
- Jabbar, M. R. A. A., et al. (2025). Integrasi nilai keislaman dalam manajemen strategik untuk membangun keunggulan kompetitif lembaga pendidikan Islam di era globalisasi digital. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(1), 185. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i1.4153>
- Kartini, D., & Kristiawan, M. (2019). Pengaruh tunjangan profesi dan motivasi kerja terhadap kinerja guru. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 25. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p25-33>
- Kultsum, U., et al. (2022). Comparative studies between public and private Islamic schools in the era of globalization. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 11(1), 421. <https://doi.org/10.11591/ijere.v11i1.22182>
- Miftahusalimah, P. L., et al. (2025). Disiplin positif pada implementasi Kurikulum Merdeka sebagai strategi dalam menumbuhkan karakter disiplin peserta didik. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 209. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i1.4331>
- Mirela, T., et al. (2022). Excavation of education fund sources at SD Negeri Samirono Yogyakarta (Penggalian sumber dana pendidikan di SD Negeri Samirono Yogyakarta). *Shautut Tarbiyah*, 28(1), 35. <https://doi.org/10.31332/str.v28i1.3906>
- Mukhlisin, A., et al. (2021). Cybernetics: Journal educational research and social studies. *Cybernetics*, 2, 62–72.
- Nur, T., et al. (2016). Analisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pendanaan yang berdampak pada daya tampung dan pelayanan madrasah menurut persepsi kepala madrasah: Studi kasus pada Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Karawang.

- Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 238.
<https://doi.org/10.32832/tadibuna.v5i2.586>
- Riyadi, S., et al. (2023). Effective promotion strategy of integrated Islamic education institutions in modern society. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan Sosial dan Agama*, 15(1), 667. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v15i1.4192>
- Rizaldi, I. B., et al. (2025). Implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka pada pembelajaran IPAS kelas V SDN 5 Cakranegara. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 188. <https://doi.org/10.51878/social.v5i1.4751>
- Suryono, Y. (2015). Profil pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan dasar. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 33(1). <https://doi.org/10.21831/jk.v33i1.7258>
- Wahyudi, K., & Soleh, B. (2023). Online-based promotion model in recruiting outstanding new students. *Re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)*, 6(1), 86. <https://doi.org/10.19105/re-jiem.v6i1.8797>
- Zainudin, M. (2021). Penyelewengan dana BOS dapat terjadi karena kurangnya transparansi pihak sekolah terhadap publik. *Jurnal Jendela Hukum*, 6(2), 32. <https://doi.org/10.24929/fh.v6i2.1558>
- Zarkasyi, A. H. (2021). Reality, expectations and policy of madrasah management in the era of regional autonomy. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 229. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v2i2.61>